



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 4 Maret 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA

UNIT KERJA : DEWAN PENGAWAS

I. DATA PRIBADI

1. Nama : MOHAMAD KUSNAENI
2. Jabatan : ANGGOTA DEWAN PENGAWAS
3. NHK : 860052

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN		Rp.	1.525.000.000
1.	Tanah dan Bangunan Seluas 96 m2/47 m2 di KAB / KOTA KOTA BEKASI , HASIL SENDIRI Rp. 525.000.000		
2.	Tanah dan Bangunan Seluas 96 m2/47 m2 di KAB / KOTA KARAWANG, HASIL SENDIRI Rp. 525.000.000		
3.	Tanah dan Bangunan Seluas 112 m2/56 m2 di KAB / KOTA KOTA CIMAHI , HASIL SENDIRI Rp. 475.000.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN		Rp.	12.500.000
1.	MOTOR, HONDA BEAT Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 2.500.000		
2.	MOTOR, HONDA SUPRA Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 2.500.000		
3.	MOTOR, YAMAHA JUPITER Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 2.500.000		
4.	MOBIL, DAIHATSU TERIOS Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp. 5.000.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA		Rp.	7.000.000
D. SURAT BERHARGA		Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS		Rp.	391.000.000
F. HARTA LAINNYA		Rp.	----
Sub Total		Rp.	1.935.500.000



III. HUTANG

Rp.

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp.

1.935.500.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.